

Nomor Surat	SB-035/CSL-LN/RUPS/IV/15
Nama Emiten	PT Link Net Tbk.
Kode Emiten	LINK
Lampiran	2
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan RUPS

Dengan ini Perseroan / Emiten menyampaikan bukti iklan tentang Pemberitahuan RUPS yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB	Investor Daily	08 Apr 2015
Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB	Suara Pembaruan	08 Apr 2015

Nama Pengirim	Dicky Setiadi Moechtar
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Jam	08 April 2015 21:19:43
Lampiran	20150408 LINK - Investor Daily - Iklan Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB.pdf 20150408 LINK - Suara Pembaruan - Iklan Pemberitahuan RUPST dan RUPSLB.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Link Net Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik. PT Link Net Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi tertera di dalam dokumen ini.

JAKARTA – Setelah meluncurkan layanan Biznet Wifi di Jakarta, Cirebon dan Indramayu pada 14 Februari 2015, Biznet Networks kembali mengumumkan hadirnya layanannya di lebih banyak lokasi dan kota di Indonesia. Kini, layanan Biznet Wifi hadir di Jakarta, Bandung (Kuta-Bali), Bandung, Batang, Bekasi, Bogor, Brebes, Cikampek, Cirebon, Comal, Depok, Indramayu, Karawang, Kendal, Palembang, Pekalongan, Pemalang, Salatiga, Semarang, Tegal, Ungaran dan Yogyakarta.

“Setelah diluncurkan di Jakarta, Cirebon dan Indramayu pada bulan Februari lalu, kami melihat bahwa respons dari masyarakat sangat positif terhadap layanan Biznet Wifi. Kami juga melihat bahwa saat ini semakin banyak masyarakat yang membutuhkan jaringan internet yang lebih cepat untuk kebutuhan pekerjaan maupun hiburan. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, kami menghadirkan Biznet Wifi yang kini memperluas jaringannya secara agresif di banyak kota di Indonesia,” ujar Adi Kusma, Presiden Direktur Biznet Networks, dalam siaran pers, Selasa (7/4).

Biznet Wifi merupakan layanan Wi-Fi prabayar yang sesuai untuk menjawab kebutuhan para kaum profesional muda, mahasiswa, turis, serta mereka yang hobi bermusik dan fotografi dan ingin berbagi hasil kerjanya dengan masyarakat luas melalui media sosial. Untuk segmen turis, Biznet Wifi hadir di Bali, terutama di wilayah Kuta dan Legian. Ini untuk membantu turis lokal maupun internasional mencari informasi dan berhubungan dengan kerabat dan keluarga mereka.

Layanan Biznet Wifi ini dapat dinikmati tanpa perlu menggunakan jaringan selular. Ini merupakan cara baru dalam menggunakan internet dengan lebih mudah dan cepat. Biznet Wifi dapat dinikmati di area-area pusat kota, seperti alun-alun yang menjadi lokasi bagi masyarakat beraktivitas dan berinteraksi dengan teman maupun keluarga.

“Biznet Wifi dapat dinikmati oleh siapapun yang

menginginkan koneksi internet cepat hanya dengan menggunakan gadget yang dimiliki. Cukup dengan melaku-

kan registrasi online tanpa diperlukan adanya perangkat tambahan,” tambah Adi. (rz)

Investor Daily, Rabu 8 April 2015 Hal. 5

LinkNet

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berpedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
- untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Perseroan

golden energy mines

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 6 April 2015, Perseroan telah menyetujui dan memutuskan untuk membagikan Dividen Interim Perseroan tahun buku 2015 sejumlah USD 1.529.411,78 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sebelas koma tujuh delapan Dollar Amerika) atau sama dengan USD 0,00026 (nol koma nol nol nol dua enam Dollar Amerika) per lembar saham dimana Perseroan akan menggunakan kurs tengah BI per tanggal 6 April 2015 senilai USD 1 = Rp. 12.942,- (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh dua Rupiah) sehingga Dividen Interim Perseroan tahun buku 2015 sejumlah Rp. 19.793.647.257,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tujuh Rupiah) atau sama dengan Rp. 3,36 (tiga koma tiga enam Rupiah) per lembar saham.

A. Bersamaan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2015 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	13 April 2015
2.	Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi	14 April 2015
3.	Cum Dividen Interim di Pasar Interim	16 April 2015
4.	Ex Dividen Interim di Pasar Interim	17 April 2015
5.	Recording date yang berhak atas Dividen Interim (DPS)	16 April 2015
6.	Pembayaran Dividen Interim	20 April 2015

B. Tata Cara Pembagian Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
- Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Interim akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 April 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 16 April 2015 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Perseroan

yang akan bertanggung jawab mematuhi ketentuan kepada Direksi Perseroan, membuat pengawasan terhadap aspek syariah dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

- Agenda Kedua
- menyetujui penggunaan Laba Bersih¹⁾
 - 1% dari laba bersih atau sebesar Rp. ...
 - 30% dari Laba Bersih atau kurang lebih dari 9.584.643.365 saham, dibayarkan kepada Pemegang Saham sebagai berikut:
 - Dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham ("Tanggal Pencatatan");
 - Direksi akan memotong pajak dividen;
 - Direksi dengan ini diberi kuasa dan terbatas pada:
 - menentukan Tanggal Pencatatan;
 - menentukan tanggal pelaksanaan;
 - 3% dari laba bersih untuk tahun buku ...

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

- Agenda Ketiga
- Menunjuk Purwantono, Suherman & Suherman sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

- Agenda Keempat
- menyetujui total pembayaran tanti nama:
 - menyetujui penetapan besarnya tanti nama;
 - menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi tahun 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;
 - menyetujui total pembayaran tanti nama:
 - menyetujui penetapan besarnya tanti nama;
 - menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi tahun 2015, berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris;
 - menyetujui total pembayaran tanti nama;
 - menyetujui penetapan besarnya tanti nama;
 - menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi tahun 2015 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris;

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

- Agenda Kelima
- menerima balik pengunduran diri dari Dewan Komisaris yang telah diberitahukan selama belau menyetujui pengangkatan Emirsya Dewawan Komisaris dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris:
 - DEWAN KOMISARIS
 - Komisaris Utama
 - Wakil Komisaris Utama (Independen)
 - Komisaris
 - Komisaris (Independen)
 - menerima kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

- Agenda Keenam
- menyetujui perubahan beberapa pasal surat penerimaan pemberitahuan 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas;
 - menyatakan kembali seluruh pasal persetujuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12;
 - memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Total Suara
-------------------------------	----------------------------

Keterangan:
¹⁾ Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham.

²⁾ Yang dimaksud dengan Laba Bersih adalah Laba Bersih sebelum pajak.

Saran saya pama seleksi pimpinan KPK sebaiknya melibatkan putra-putri terbaik dan meruakan perwakilan daerah. Agenda pemberantasan korupsi harus dari seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, anggota panel ada 12 orang setidaknya separuhnya perwakilan daerah. Jadi benar-benar beragam," ujar anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, di Jakarta, Rabu (8/4).

Daerah, kata Djamil, memiliki perguruan tinggi yang tidak kalah baiknya dengan yang ada di Pulau Jawa. Hal itu juga diamaksudkan agar rakyat merasa terwakili dalam memilih calon pimpinan KPK.

"Sehingga pemberantasan korupsi ini menjadi agenda bersama seluruh rakyat Indonesia. Anggota penselnya jangan

seleksi bermasalah dan itu terjadi akibat penjarangan calon tidak sesuai harapan.

Komisi III, kata Nasir, tidak mau kecolongan lagi dalam memilih pimpinan KPK. Pansel capim KPK harus memiliki agenda nasional, dan mampu menjangkau orang yang memiliki kredibilitas memberantas korupsi.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pansel capim KPK akan dibentuk pada bulan April ini. Dia berharap dalam waktu dekat anggota pansel akan diseleksi pemerintah. "Dalam waktu dekat, kita usahakan begitu (bulan April)," ujar Pratikno, usai mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, di kompleks parlemen, Senin (6/4). [H-14]

Atik Hadyanti menolak permohonan yang bersangkutan untuk seluruhnya. "Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Tatik, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Rabu (8/4).

Hakim Tatik menolak penetapan tersangka sebagai objek praperadilan kendati, Pasal 10 ayat (1) UU No: 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

Dalam pertimbangannya, Hakim Tatik mengutip pendapat ahli termohon yakni, mantan hakim agung Yahya Harahap yang menyebutkan, penetapan tersangka bukan bagian dari upaya paksa yang diatur dalam KUHP.

Disebutkan pula bahwa,



Suryadharma Ali

penetapan tersangka merupakan tindakan administratif perubahan status dari bukan tersangka menjadi tersangka yang dilindungi oleh hukum. Dirinya menolak dalil-dalil pemohon yang telah masuk ke pokok perkara seperti belum adanya perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. "Ada tidaknya bukti permulaan di antaranya belum ada pembuktian kerugian negara sudah masuk substansi perkara bukan kewenangan lembaga praperadilan," kata Tatik.

Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang disaksikan oleh Ketua PPP versi Mukhtar Jakarta Djan

Sebab, penters merampas H belum dikenal ahanan. "Haki memperluas w belum ditahan (menjadi) tersa merampas HA ada upaya pe penyitaan itu. Oleh karena i berani tuntutan kata Humphr

Panggil Paksa

Sementara Sementara (KPK) akan n dakan tegas de giliran paksa te Menteri Agama Ali (SDA) jika gkir dari pang Mantan Ketua diketahui telah memenuhi pan

FAKSI: Hentikan Kriminalisasi Kasus Indra F

[JAKARTA] Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI) meminta Jaksa Agung untuk memperingatkan bawahannya di Kejaksaan Negeri Medan untuk mencermati ulang berkas kasus Indra Faisal vs Hasan Widjaja, yang diawali dengan kasus jual beli rumah tahun 1997. Patut diduga, kasus ini bernuansakan kriminalisasi dari perdata murni bergeser ke pidana den-

gan beberapa bukti pendukung di antaranya berkas 3 (tiga) kali dikembalikan oleh Jaksa. Kasus ini terkesan dipaksakan sehingga aroma "main mata" terjadi di antara penegak hukum yang dapat dilihat dari proses yang sedang berjalan.

Demikian ditegaskan Koordinator FAKSI, Hermawati Taslim dan Konsultan Komunikasi Politik dan Hukum, AM Putut Praban-

toro, di Jakarta, Selasa (7/4), setelah menerima pengaduan kasus Indra Faisal dan isterinya, Ester Boru Ginting dari Medan. FAKSI juga meminta Mabes POLRI untuk menyelidiki kemungkinan diceradainya profesionalisme POLRI dan bila perlu dilakukan gelar ulang perkara di Mabes POLRI Jakarta.

Hermawati Taslim, yang juga Wakil Ketua Badan

Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem (BAHU) menjelaskan bahwa, FAKSI akan mengawal kasus ini dengan sek-sama terutama karena Jaksa Agung telah berkomitmen membentuk Satgas Anti Mafia Hukum. FAKSI, menurut Hermawati, merupakan kumpulan pengacara profesional yang mendedikasikan sebagian waktu dan profesionalisme untuk mener-

ima berbagai p seluruh penjur dilakukan seca

Sementara bantoro menj dalam kasus versus Hasan nakan pember nuansakan n yang diserang dari Indra, ya tidak ada ko kasus ini. Ji

LinkNet

PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT LINK NET Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") di Jakarta pada hari Jum'at, tanggal 15 Mei 2015.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Panggilan untuk Rapat akan diiklankan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berperedaran nasional dan satu lainnya beredar atau terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Pada Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:

- untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
- untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Para Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat dilakukan oleh Direksi.

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Perseroan



Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima audiensi Duta Besar Venezuela di Gedung Nusantara III lantai 9, komo kesempatan tersebut Dubes Venezuela Darwin Tova kepada negara Venezuela, bahwa negara tersebut kekerasan seperti yang di tuduhkan beberapa negar